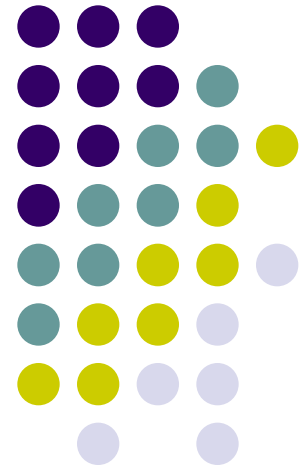
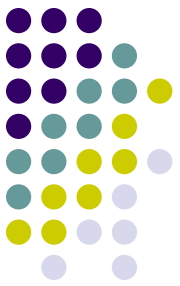

Perkembangan Bangsa Barat



KEMUNDURAN VOC



Tahun 1799, VOC mengalami masa kemunduran. Kemunduran tersebut diakibatkan oleh faktor-faktor berikut.

- Gencarnya persaingan dari negara Prancis dan Inggris.
- Korupsi dan pencurian yang dilakukan pegawai VOC.
- Maraknya perdagangan gelap di jalur monopoli VOC.
- Besarnya anggaran belanja VOC tidak sebanding dengan pemasukannya.

PEMBUBARAN VOC

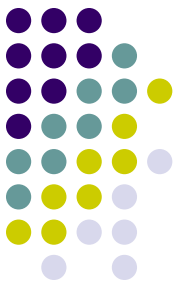


- Louis Napoleon Bonaparte, sebagai Raja Belanda, memutuskan supaya VOC dibubarkan pada 31 Desember 1799.
- Louis Napoleon Bonaparte kemudian menunjuk Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal di Indonesia.



Sumber: www.wikipedia.org

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAENDELS



Daendels dalam melaksanakan tugasnya melakukan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut.

- Membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan dengan kerja rodi (kerja paksa),
- membangun pabrik senjata di Semarang, dan
- membangun pangkalan armada laut di Merak dan Ujung Kulon.



KEBIJAKAN-KEBIJAKAN DAENDELS



Untuk mendapatkan dana, Daendels menetapkan beberapa peraturan:

- penyerahan pajak berupa hasil bumi (*Contingenten*),
- kewajiban menjual hasil bumi hanya kepada pemerintah Belanda dengan harga yang telah ditetapkan (*Verplichte Leverantie*), dan
- kewajiban yang ditetapkan kepada rakyat Priangan untuk menanam kopi (*Prianger Stelsel*).

KEKUASAAN INGGRIS DI INDONESIA



- Kekuasaan Inggris di Indonesia dimulai sejak tahun 1811 setelah Inggris melakukan serangan darat dan laut atas wilayah kekuasaan Belanda di Pulau Jawa.
- Akibat serangan tersebut, Belanda menyerah tanpa syarat dan menandatangani **Perjanjian Tuntang** pada **11 September 1811**.

PERJANJIAN TUNTANG



Isi Perjanjian Tuntang:

- Seluruh kekuatan militer yang berada di Asia Tenggara harus diserahkan pada Inggris.
- Utang pemerintahan Belanda tidak diakui Inggris.
- Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luar Jawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.

SIR THOMAS STAMFORD RAFFLES



EIC melalui Lord
Minto menunjuk
**Sir Thomas
Stamford Raffles**
(1811-1813)
sebagai gubernur
jenderal.



Sumber: *Repro Museum
Kebangkitan Nasional*

KEBIJAKAN-KEBIJAKAN RAFFLES



Kebijakan penting yang dilakukan Raffles antara lain:

- Membagi wilayah Pulau Jawa menjadi 16 daerah Kerasidenan. Hal itu dimaksudkan untuk memudahkan mengatur dan mengawasi Pulau Jawa.
- Raffles juga menghapus kerja rodi.
- Menghapus semua kebijakan Daendels.
- Mengadakan sistem pemungutan sewa tanah.

KEMBALINYA KEKUASAAN BELANDA DI INDONESIA



- Tahun 1814, Belanda kembali menguasai Indonesia melalui Konvensi London.
- Selanjutnya, Pemerintah Kolonial Belanda dipegang oleh sebuah komisi yang beranggotakan Van der Capellen, Elout, dan Buyskes.

KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA



Pada masa pemerintahan **Thomas Stamford Raffles**, pemerintah kolonial Inggris menerapkan kebijakan ekonomi yang berdasarkan **asas liberal**.

- Kebijakan tersebut adalah **Landrent System (sistem sewa tanah)**. Raffles berpendirian bahwa semua tanah adalah milik raja yang berdaulat. Jadi, semua tanah milik pemerintah Inggris. Orang yang ingin memiliki tanah harus menyewanya dari pemerintah dan membayar sewa pajak yang disebut sewa tanah.

KEBIJAKAN PEMERINTAH BELANDA DI BIDANG EKONOMI DI INDONESIA



Pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels, kebijakan ekonomi dilakukan untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dialami oleh pemerintah Belanda, yaitu:

- Pemerintah Belanda menjual tanah-tanah milik Gubernur kepada pihak partikelir.
- kebijakan **Cultuurstelsel** atau **Sistem Tanam Paksa**. Adapun pokok-pokok kebijakan ini adalah bahwa berdasarkan perjanjian, penduduk Indonesia menyediakan seperlima tanahnya untuk ditanami tanaman-tanaman yang ditetapkan Gubernur.
- Membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

UNDANG UNDANG AGRARIA



Untuk menjamin kepentingan rakyat dan para pemodal, pada tahun 1870 ditetapkan Undang-undang Agraria. Isi undang-undang ini adalah sebagai berikut.

- Gubernur Jenderal tidak diperbolehkan menjual tanah milik pemerintah. Tanah itu dapat disewakan paling lama 75 tahun.
- Tanah milik pemerintah antara lain, tanah yang belum dibuka, tanah yang berada di luar wilayah milik desa dan penghuninya, serta tanah milik adat.
- Tanah milik penduduk antara lain semua sawah, ladang, dan sejenisnya yang dimiliki langsung oleh penduduk desa. Tanah semacam itu boleh disewa oleh pengusaha swasta selama lima tahun.

KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS DI BIDANG POLITIK DI INDONESIA



Di bawah pemerintahan **Raffles**, Inggris dapat menanamkan pengaruh politik di Indonesia meskipun hanya terbatas di Jawa.

- Saat itu, Raffles membagi Pulau Jawa menjadi **16 keresidenan**.
- Tiap-tiap keresidenan dibentuk badan pengadilan (**landraad**).

KEBIJAKAN PEMERINTAH BELANDA DI BIDANG POLITIK DI INDONESIA



- Pada masa Daendels, pemerintah Belanda mengambil kebijakan untuk memperkuat angkatan bersenjatanya.
- Pemerintah Belanda merekrut banyak orang Indonesia untuk dijadikan tentara.
 - Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
 - Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan dengan kerja rodi.
 - Untuk menyukseskan kebijakan ini, pemerintah Belanda tidak segan-segan memecat pejabat-pejabat pemerintah maupun kerajaan yang menentang. Contohnya adalah Sultan Banten dan Sultan Cirebon.

JALAN RAYA ANYER-PANARUKAN



Sumber: Hasil olahan sendiri dengan mengacu pada *Historical Atlas of Indonesia*

KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS DI BIDANG SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA



- Pada masa Raffles, pemerintah kolonial memberi bantuan kepada para ahli pengetahuan seperti **Horsfield, Crawford, dan Mackensie** untuk menyelidiki peninggalan sejarah kuno di **Indonesia**.
- Pemerintah Raffles juga membantu lembaga-lembaga kebudayaan, seperti Lembaga Betawi untuk memajukan kebudayaannya.
- Raffles sendiri kemudian menerbitkan buku yang berjudul **History of Java** pada tahun 1817.

KEBIJAKAN PEMERINTAH BELANDA DI BIDANG SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA



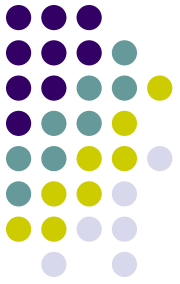
- Pemerintahan Belanda melaksanakan **Politik Pintu Terbuka**.
- Menerapkan **kebijakan (politik) Etis**. Kebijakan ini meliputi bidang **transmigrasi, irigasi, dan pendidikan**.

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH BELANDA TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI DI INDONESIA



- Pada masa Herman Willem Daendels, pemerintah kolonial mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk kerja rodi.
- Akibatnya, tidak sedikit korban yang meninggal dari kebijakan ini.
- Selain itu, kemiskinan dan kemelaratan timbul di mana-mana. Hal ini terjadi karena rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mengerjakan sawah, ladang, dan peternakannya. Seluruh waktunya dihabiskan untuk kerja rodi.

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH BELANDA TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI DI INDONESIA



Terdapat pula penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan kebijakan Sistem Sewa tanah, sebagai berikut:

- Tanah yang diserahkan untuk ditanami tanaman ekspor lebih dari seperlima, bahkan kadang-kadang setengahnya.
- Tanah yang dipilih untuk ditanami tanaman ekspor adalah tanah yang subur sehingga tanah yang tersisa untuk penduduk hanya tanah-tanah yang kurang subur.
- Waktu bekerja pada pemerintah untuk masyarakat yang tidak memiliki lahan lebih dari ketentuan 66 hari.
- Lahan yang disediakan untuk tanaman ekspor tetap dikenakan pajak.
- Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar tidak dibayarkan kembali kepada rakyat.
- Kegagalan panen tanaman wajib tetap menjadi tanggung jawab rakyat.

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH INGGRIS TERHADAP KEHIDUPAN EKONOMI DI INDONESIA



Pada masa Thomas Stamford Raffles, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi liberal. Namun, dalam kenyataannya kebijakan ini tidak dapat dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh kendala-kendala berikut.

- Sistem feodal telah berakar dan menjadi tradisi di Indonesia.
- Pegawai pemerintahan yang cakap untuk mengendalikan pelaksanaan sistem ini jumlahnya terbatas.
- Rakyat Indonesia belum siap menerima sistem yang baru.
- Kepemilikan tanah masih berciri tradisional.

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK DI INDONESIA



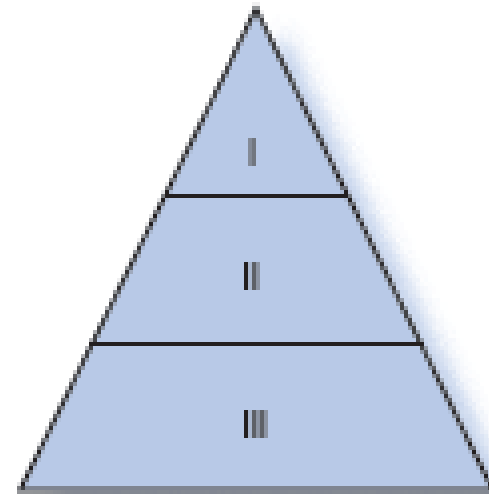
- Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia berpengaruh pada kekuasaan para penguasa lokal seperti raja, sultan, dan adipati. Mereka tidak lagi memiliki kekuasaan yang besar karena sering dicampuri pemerintah kolonial.
- Dengan kenyataan seperti ini, tidak jarang bahwa kekuasaan penguasa lokal terhadap wilayahnya hanya secara **de jure (hukum)**, tetapi secara **de facto (nyatanya)** dikuasai oleh pemerintah kolonial.

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL DI INDONESIA



Munculnya kelompok masyarakat berdasarkan golongan, yaitu:

- Kelompok masyarakat Eropa menempati kelas teratas.
- Kelas di bawahnya adalah kelompok masyarakat bangsawan.
- Kelompok masyarakat jelata menempati kelas terendah.



Keterangan:

- I Masyarakat Eropa (kaum kolonial)
- II Masyarakat bangsawan (keluarga istana dan pegawai pemerintah kolonial)
- III Rakyat jelata

Sumber: Hasil olahan sendiri

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL TERHADAP KEHIDUPAN BUDAYA DI INDONESIA



- Bangsa Barat memiliki kebiasaan dan tradisi tertentu. Kedatangan mereka berpengaruh pada budaya lokal.
- Muncul berbagai tradisi barat yang kemudian berkembang dalam masyarakat pribumi, khususnya di kalangan bangsawan, seperti tradisi dansa.
- Selain itu, banyak tradisi kerajaan lokal yang luntur setelah campur tangan Belanda. Tradisi lokal juga ada yang berakulturasi dengan budaya Barat (Belanda) terutama di Jawa.

PERLAWANAN RAKYAT INDONESIA TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL



- Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Inggris tidak terjadi reaksi yang berarti.
- Perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda terjadi di Maluku, Jawa, Sumatra Barat, Aceh, Sumatra Utara, Bali, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan perlawanan rakyat yang berupa gerakan sosial.



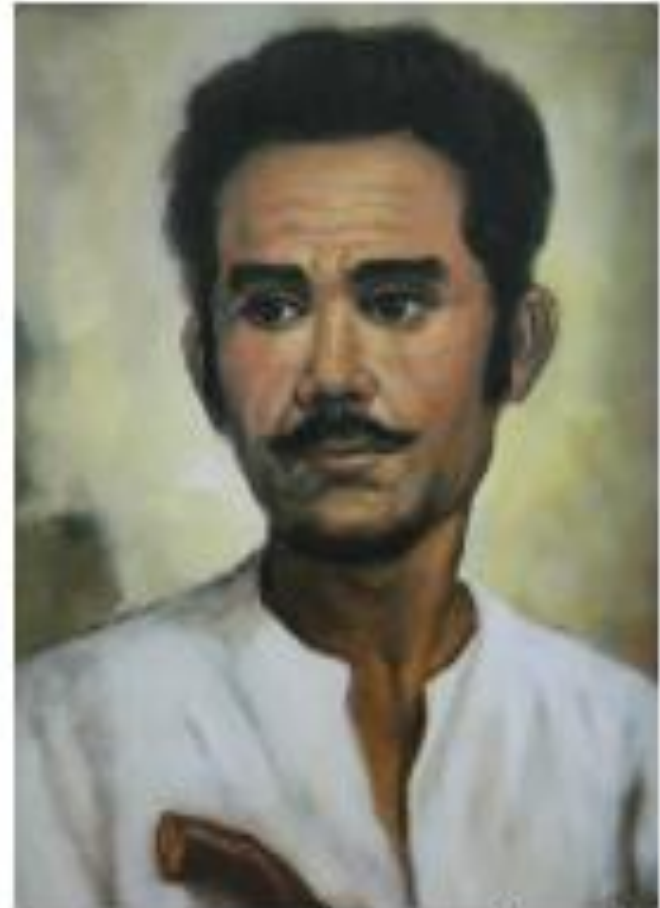
PERLAWANAN RAKYAT MALUKU TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL

- Pemberontakan timbul sebagai reaksi masyarakat Maluku atas kedatangan kembali Belanda ke daerah Maluku.
- Perlawanan rakyat Maluku berkobar di **Pulau Saparua**. Perlawanan ini dipimpin oleh **Thomas Mattulesia (Pattimura)**. Saat itu **Benteng Duurstede** di pulau itu berhasil dihancurkan oleh pasukan Maluku.
- Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku ini, Maluku diblokade oleh Belanda. Rakyat akhirnya menyerah karena kekurangan makanan.
- Untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan, Pattimura menyerahkan diri dan dihukum mati.
- Pemimpin perlawanan digantikan oleh **Christina Martha Tiahahu**, seorang pejuang perempuan. Ia berhasil ditangkap, kemudian diasingkan ke Pulau Jawa, ia meninggal di perjalanan.

KAPITEN PATTIMURA



Thomas Mattulessia, dikenal juga sebagai Pattimura. Salah satu tokoh perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda.



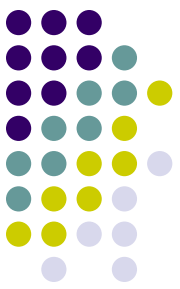
Sumber: Lukisan kolektif Soehib

SEBAB-SEBAB UMUM MUNCULNYA PERANG DIPONEGORO



- Kekuasaan raja Mataram semakin kecil dan turun wibawanya. Terjadi pemecahan wilayah menjadi 4 kerajaan kecil, yaitu Surakarta, Ngayogyakarta, Mangkunegaran, dan Paku Alam.
- Kaum bangsawan merasa penghasilan mereka berkurang. Daerah yang dulu dibagikan kepada para bangsawan, diambil oleh Beanda.
- Rakyat merasa tertindas. Rakyat harus kerja rodi membayar pajak tanah.

SEBAB-SEBAB KHUSUS MUNCULNYA PERANG DIPONEGORO



Pembuatan jalan yang dilakukan oleh Belanda melewati makam leluhur Pangeran Dipenogoro di Tegal Rejo. Patih Danurejo IV yang merupakan kaki tangan Belanda memerintahkan memasang patok-patok tersebut. Peristiwa ini berkali-kali, sampai akhirnya Belanda melakukan serangan tiba-tiba.

PERANG DIPONEGORO (1825-1830)



- Menghadapi pasukan Diponegoro ini, Belanda melakukan strategi untuk memperlemah kekuatan musuh. Mereka mengangkat kembali Sultan Sepuh (HB II). Ini bertujuan agar para bangsawan yang membantu Diponegoro kembali ke istana.
- Untuk mempersempit ruang gerak Diponegoro, Jenderal de Kock menciptakan **Strategi Benteng Stelsel**.
- Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh **Jenderal De Kock** di Magelang. Di dalam perundingan ini Pangeran Diponegoro ditangkap lalu diasingkan ke Manado dan dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya.

PERLAWANAN RAKYAT SUMATRA BARAT TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL



- Perlawanan terhadap kekuasaan Belanda di Sumatra mula-mula berkobar di **Minangkabau (Sumatra Barat)**.
- Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda tersebut dimulai dengan **perang saudara** antara **kaum Adat dan kaum Padri**. Pada **tahun 1821**, Belanda masuk dalam perselisihan kedua golongan ini. Belanda memihak kaum Adat sehingga berkobarlah perlawanan antara kaum Padri melawan Belanda.
- Pimpinan Padri mula-mula dipegang oleh **Tuanku nan Renceh**, kemudian oleh **Datuk Bendaharo, Tuanku Pasaman**, dan **Malim Basa**. **Malim Basa** kemudian dikenal sebagai **Tuanku Imam Bonjol**.
- Pada **tahun 1837**, wilayah Bonjol direbut Belanda dan Imam Bonjol ditangkap. Ia dibuang ke Ambon kemudian ke Minahasa.
- Perang perlawanan terhadap Belanda diteruskan oleh Tuanku Tambusi. Namun, tidak lama kemudian perang dapat diakhiri.

PERANG PADRI



Perang Padri dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu sebagai berikut.

- **Tahun 1821–1825**, ditandai dengan meluasnya perlawanan rakyat ke seluruh daerah Minangkabau.
- **Tahun 1825–1830**, ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan kaum Padri yang mulai melemah. Ketika itu, Belanda sedang memusatkan perhatiannya pada Perang Dipenogoro di Jawa.
- **Tahun 1830–1838**, ditandai dengan perlawanan Padri yang meningkat dan penyerbuan Belanda secara besar-besaran. Diakhiri dengan tertangkapnya pemimpin-pemimpin Padri.

TUANKU IMAM BONJOL



Tuanku Imam Bonjol, salah satu tokoh perlawanan rakyat Sumatra Barat melawan Belanda.



Sumber: Lukisan koleksi Soehib

PERLAWANAN RAKYAT ACEH TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL



- Penyebab terjadinya Perang Aceh terutama karena nafsu Belanda untuk menguasai daerah Aceh.
- Laskar Aceh dipimpin oleh Panglima Polim, Teungku Cik Di Tiro, Teuku Ibrahim, **Teuku Umar** bersama istrinya **Cut Nyak Dien**.



Sumber: Lukisan koleksi Soehib

PERLAWANAN RAKYAT ACEH TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL



- Untuk mengatasi perlawanan rakyat Aceh tersebut, Belanda kemudian menggunakan usul **Dr. Snouck Hurgronje** dalam bukunya “**De Atjehers**”.
- Dalam bukunya tersebut, ia mengusulkan agar rakyat Aceh diadu domba kemudian diserang habis-habisan.



Sumber: www.wikipedia.org

PERLAWANAN RAKYAT ACEH TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL



- Tugas penyerangan Aceh diserahkan kepada **Kolonel J.B. Van Heutz** yang segera membentuk **Marsose (pasukan gerak cepat)**.
- Satu per satu para pemimpin Aceh gugur dan menyerah. **Teuku Umar** gugur di **Meulaboh**. **Panglima Polim** dan **Sultan Muhammad Dawod Syah** menyerah.
- Kemudian diadakan perjanjian yang disebut **Pelakat Pendek**. Berdasarkan perjanjian ini, Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan patuh pada perintah-perintahnya. Aceh juga bersedia tidak berhubungan dengan negara lain.

PERLAWANAN RAKYAT SUMATRA UTARA TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL



- Perlawanan rakyat Sumatra terhadap Belanda juga terjadi di **Tapanuli** selama kurang lebih 29 tahun, dimulai tahun 1878 dan berakhir tahun 1907.
- Tentara Belanda yang berkedudukan di Tarutung diserang pasukan **Si Singamangaraja XII** yang bermarkas di Bakkara.
- Dalam penyerangan Belanda di bawah pimpinan **Hans Christoffel** pada tanggal 17 Juni 1907, Si Singamangaraja XII yang memusatkan pertahanan terakhir di Dairi berhasil ditembak Belanda, mengakibatkan gugurnya Si Singamangaraja XII. Hal ini membuat berakhirnya perang Tapanuli.

SI SINGAMANGARAJA XII



Si Singamangaraja XII, salah satu tokoh perlawanan rakyat Sumatra Utara melawan Belanda.



Sumber: Lukisan Koleksi Soehib

PERLAWANAN RAKYAT BALI TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL



- Pada masa itu, pemerintah Belanda dan raja-raja di Bali sudah memiliki satu perjanjian, yang berkaitan dengan Hak Tawan Karang.
- **Hak Tawan Karang** adalah hak para raja Bali untuk merampas kapal-kapal yang karam di perairan Bali.
- **Raja Buleleng** merampas kapal Belanda yang karam di wilayah perairannya. Tindakan raja Buleleng ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda. Belanda menyerang Buleleng dan berhasil merebut istana Buleleng. Raja Buleleng kemudian menyingkir ke Jagaraga.
- Tiga tahun kemudian, Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap kerajaan-kerajaan di Bali. Pasukan Belanda ini dipimpin oleh **Jenderal Michiels**. Jagaraga kemudian dapat direbut. Setelah Jagaraga, Klungkung, Karangasem, dan Gianyar juga dapat direbut Belanda.

PERLAWANAN RAKYAT SULAWESI SELATAN TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL



- Kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan banyak yang masih mengadakan perlawanan terhadap Pemerintah Belanda. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain **Kerajaan Soppeng**, **Kerajaan Tanete** yang dipimpin oleh **Raja La Patau**, dan **Kerajaan Bone**.
- Perlawanan diawali oleh tindakan **Gubernur Jendral Van der Capellen** yang ingin memperbaiki **Perjanjian Bongaya**, ketiga kerajaan tersebut menentang keras usaha tersebut.
- Pasukan gabungan Belanda di bawah **pimpinan de Stuers**, dapat mematahkan perlawanan Kerajaan Soppeng dan Tanete.
- Perlawanan selanjutnya tetap dilakukan Kerajaan Bone di bawah pimpinan **Sultan Bone, Raja Putri**.
- **Pada tahun 1825**, akhirnya Kerajaan Bone dapat ditaklukan.

VAN DER CAPELLEN



Van der Capellen
Gubernur Jendral
Belanda yang ingin
memperbaiki
Perjanjian Bongaya,
tetapi mendapat
perlawanan dari
rakyat Sulawesi
Selatan.



PERLAWANAN RAKYAT KALIMANTAN SELATAN TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL



Perlawanan rakyat Banjar terhadap Pemerintah Belanda meletus **pada tahun 1859** disebabkan rakyat dan beberapa bangsawan Banjar tidak senang dengan campur tangan Belanda terhadap pengangkatan **Pangeran Tamjid Illah** menjadi sultan. Padahal, yang lebih berhak menjadi sultan adalah **Pangeran Hidayat**.

PERLAWANAN RAKYAT KALIMANTAN SELATAN TERHADAP PEMERINTAH KOLONIAL



Perlawanan rakyat Banjar berlangsung hampir setengah abad. Perlawanan rakyat Banjar jika dilihat dari corak perlawanan terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- **Perlawanan ofensif (mengadakan serangan)** yang berlangsung dari tahun 1859–1863 di bawah pimpinan **Pangeran Antasari**.
- **Perlawanan defensif (mengadakan pertahanan)** yang berlangsung dari tahun 1863–1905 dipimpin oleh **Gusti Matsaid, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, Penghulu Rasyid, Gusti Matseman, dan Pangeran Perbatasari**.

GERAKAN SOSIAL



- **Gerakan Para Petani** muncul akibat tindakan sewenang-wenang para tuan tanah yang berkuasa yang menindas dan memeras para petani. Berkembang di Ciomas, Surabaya, dan Semarang.
- **Gerakan Ratu Adil** muncul di Sidoarjo dan Kediri. Gerakan ini berkembang karena adanya kepercayaan bahwa akan datang Sang Ratu Adil. Ratu Adil itu akan membebaskan masyarakat dari kesengsaraan termasuk kesengsaraan akibat tekanan yang dilakukan pemerintah Belanda.
- **Gerakan keagamaan** muncul sebagai suatu reaksi dari pengaruh Barat yang dibawa oleh orang-orang Belanda di Indonesia. Gerakan ini bertujuan untuk memurnikan kembali masyarakat muslim kepada ajaran agama Islam. Berkembang di Pekalongan.